**DRAFT**

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA**

**JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH (BUD)**

**ANTARA**

**..............................................**

**DENGAN**

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

 **NOMOR :**

 **: /IT3/KsP/2014**

 **TANGGAL : 2014**

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA**

**JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH (BUD)**

**ANTARA**

**..................................................**

**DENGAN**

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

 Nomor :

 Nomor : / IT3 / KsP / 2014

Pada hari ini,......... tanggal ............ bulan ......... tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di …………………., yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. ..........................................................** : ..................................... , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ................., yang berkedudukan di ........, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**

**2**. **Yonny Koesmaryono** : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor yang berkedudukan di Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Darmaga, Bogor, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerjasama mengenai **kegiatan belajar mengajar Program Sarjana** yang dilaksanakan oleh Institut Pertanian Bogor seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**

**PENGERTIAN**

Beasiswa Utusan Daerah (BUD) adalah suatu cara penerimaan mahasiswa baru IPB yang direkomendasikan dan dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan atau Lembaga Swasta, yang bila lulus diharapkan kembali ke daerah asal untuk membangun daerah.

**Pasal 2**

**TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di .........., melalui penyelenggaraan pendidikan program Sarjana bagi para mahasiswa penerima Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dari ......... di Institut Pertanian Bogor.

**Pasal 3**

**RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup kerjasama ini mencakup Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana oleh PIHAK KEDUA untuk mahasiswa yang diutus dan dibiayai PIHAK PERTAMA melalui Jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD).
2. PIHAK PERTAMA pada tahun ajaran 2014/2015 akan mengirimkan sebanyak .... (.....) mahasiswa untuk menempuh program sarjana (S-1) di Institut Pertanian Bogor.
3. Nama-nama para mahasiswa penerima BUD sebagaimana dimaksud disajikan sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 4**

**TUGAS DAN WEWENANG**

1. PIHAK PERTAMA melakukan sosialisasi dan penjaringan calon mahasiswa Jalur BUD serta mendaftarkan calon mahasiswa terpilih kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA melakukan seleksi calon mahasiswa yang akan diterima sebagai mahasiswa Jalur BUD dan mengirimkan hasil seleksi secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 5**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Kewajiban Pihak Pertama :**

1. Membayar biaya pelaksanaan pendidikan sebagaimana pasal 7 kepada PIHAK KEDUA.
2. Mengurus keberangkatan mahasiswa terpilih ke kampus Institut Pertanian Bogor.
3. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan program beasiswa.
4. Menjamin bahwa mahasiswa tidak mengundurkan diri dengan alasan apapun.
5. Menjamin bahwa mahasiswa tidak pindah dari jalur BUD ke jalur reguler.

**Kewajiban Pihak Kedua :**

1. Menyelenggarakan pendidikan Program Sarjana.
2. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan program beasiswa.
3. Bertanggungjawab terhadap proses belajar mengajar kepada mahasiswa penerima beasiswa dengan berpegang pada Buku Panduan Sarjana IPB yang berlaku mengenai ketentuan akademik dan kemahasiswaan.
4. Membuat laporan perkembangan Akademik per tahun kepada PIHAK PERTAMA.

**Hak Pihak Pertama :**

1. Melakukan monitoring pelaksanaan pendidikan kepada Pihak Kedua.
2. Memberikan teguran secara lisan dan tulisan bilamana Pihak Kedua lalai atau tidak memenuhi kewajiban.

**Hak Pihak Kedua :**

1. Menerima dana untuk pembiayaan program beasiswa sesuai dengan jadwal dan besaran yang telah disepakati.
2. Melakukan monitoring pembiayaan program beasiswa kepada Pihak Pertama.
3. Memberikan teguran secara lisan dan tulisan bilamana Pihak Pertama lalai atau tidak memenuhi kewajiban.
4. Memberikan status non aktif bagi mahasiswa apabila Pihak Pertama belum membayarkan biaya pendidikan (SPP) selama lebih dari 2 (dua) semester, sesuai kalender akademik IPB.

**Pasal 6**

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan pendidikan seperti dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini ditetapkan selama 10 (sepuluh) semester.
2. Jika jangka waktu pelaksanaan seperti dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diatas tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang menjadi maksimal 14 (empat belas) semester.
3. Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (2) diatas, maka akan dibuat perjanjian tersendiri.

**Pasal 7**

**PEMBIAYAAN YANG BERLAKU SAAT INI**

1. Biaya pelaksanaan Program Pendidikan S1 IPB sebesar Rp 22.000.000,- /mahasiswa (dua puluh dua juta rupiah) pertahun termasuk SPP dan biaya tutorial. Biaya pendidikan ini hanya untuk satu mayor, bukan mayor ganda.
2. Biaya tahun pertama (dibayarkan sekali pada tahun pertama) :
	1. Biaya Pendaftaran Rp 400.000,- / mahasiswa (empat ratus ribu rupiah)
	2. Biaya Perlengkapan Mahasiswa Baru sebesar Rp 700.000,- /mahasiswa (tujuh ratus ribu rupiah).
	3. Biaya Asrama TPB-IPB Rp 1.200.000,-/mahasiswa (satu juta dua ratus ribu rupiah).
	4. Biaya Deposit Asrama Rp 100.000,-/mahasiswa (seratus ribu rupiah).
	5. Biaya Perhimpunan Orang Tua Mahasiswa/POM IPB Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
	6. Biaya akses Internet untuk mahasiswa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Biaya penunjang pendidikan :
	1. Biaya riset atau penyelesaian tugas akhir sebesar Rp …………...
	2. Biaya hidup (makan, pemondokan, transportasi, perlengkapan pribadi, buku, diktat dan fotokopi) sebesar Rp ………………………/bulan
	3. Biaya buku sebesar Rp. ……………./bulan
	4. Biaya Tempat Tinggal Rp. …………/bulan
	5. Biaya Asuransi Rp. ……… / tahun
	6. Biaya transport keberangkatan dan kepulangan sebesar Rp. …………..
	7. (Biaya lain-lain dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan program penyandang dana)

**Pasal 8**

**PEMBAYARAN**

1. Biaya pelaksanaan tersebut pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibayarkan melalui transfer ke rekening pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor virtual account masing-masing mahasiswa seperti terlampir
2. Pembayaran biaya pelaksanaan pendidikan tersebut pada Pasal 7 ayat 1 dapat dilakukan dengan cara pembayaran per tahun yang dibayarkan setiap awal tahun ajaran sesuai dengan kalender akademik yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA
3. Biaya penunjang pendidikan pada pasal 7 ayat 3 dibayarkan langsung oleh PIHAK PERTAMA kepada Mahasiswa

**Pasal 9**

**LAPORAN PELAKSANAAN**

1. PIHAK KEDUA menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan pendidikan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setiap tahun kepada PIHAK PERTAMA.
2. Hasil penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana merupakan pertanggungjawaban PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA.
3. Laporan hasil pelaksanaan Pendidikan Program Sarjana sebagaimana disebut dalam pasal-pasal perjanjian ini disampaikan 3 (tiga) minggu setelah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam pasal 6 diatas.

**Pasal 10**

**PEMBATALAN PERJANJIAN**

1. Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA), perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 6 perjanjian ini berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon).
2. Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

**Pasal 11**

**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
2. Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
3. Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
4. Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud pasal 11 Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

**Pasal 12**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 13**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Dalam hal PARA PIHAK mengalami pergantian pejabat penandatangan, perubahan manajemen, organisasi, atau perubahan tempat domisili, maka PARA PIHAK menjamin bahwa secara hukum perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan selesainya pekerjaan.
2. Suatu perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari kedua belah pihak, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

3) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak.

**Pasal 14**

**KORESPONDENSI**

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara tertulis.
2. Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA:** Nama : ……………………….Jabatan : ……………………….Alamat : ……………………….Telp/Fax : ……………………….Email : ………………………. | **PIHAK KEDUA:**Nama : Jabatan : Ketua Tim BUDAlamat : Gedung Andi Hakim Nasoetion, lantai 2 Kampus IPB Darmaga, BogorTelp/Fax : 0251-8624092, 8629882Email : bud@ipb.ac.id |

1. Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut diatas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

................. , ............... 2014

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KEDUA****INSTITUT PERTANIAN BOGOR****Yonny Koesmaryono****Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan** | **PIHAK PERTAMA****..........................................****...................................................****.....................................** |

**Lampiran 1.** Surat Perjanjian Kerjasama Antara ......................... dengan Institut Pertanian Bogor

Perihal .......... (........) Orang Calon Mahasiswa penerima Beasiswa Utusan Daerah Th. 2014

**Tabel 1. Daftar .......... (...........) Orang Penerima Beasiswa Utusan Daerah dari ..................................................**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **NIM** | **Mayor** | **Nomor Virtual Account** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KEDUA****INSTITUT PERTANIAN BOGOR****Yonny Koesmaryono****Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan** | **PIHAK PERTAMA****...........................................****...................................****...............** |